**BAB II**

**Kemitraan Strategis Indonesia-Amerika Serikat**

* 1. **Latar Belakang Kerjasama Militer Indonesia-AS Di Bidang Politik Dan Keamanan**
		1. **Postur Militer Indonesia**

Lebih dari satu dekade sejak reformasi 1998 bergulir, publik pun bertanya soal apa dan bagaimana kebijakan Indonesia dalam merespon pembangunan militer negara-negara di Asia Tenggara, setidaknya hingga tahun 2010. Selama kurun 1998-2010, upaya Singapura, Malaysia, dan Thailand terlihat cukup intensif guna mempertangguh postur (kekuatan dan kemam­puan) pertahanan di ketiga armada militernya (darat, laut, udara). Dalam masa lebih dari satu dekade itu, Singapura adalah satu-satu­nya negara yang sangat agresif.

Tahun 2003, 2007, dan 2008 merupakan titik-titik penting di mana Indonesia terli­hat berupaya mem­perko­koh postur pertahanannya. Namun, sejak 1998, saat di mana krisis ekonomi menerpa Asia Tenggara dan reformasi domestik juga berlangsung, dapat dikatakan Indonesia tidak melakukan respon terha­dap kondisi perkembangan lingkungan strategis di Asia Tenggara. Masa ini lebih dititik-beratkan kepada upaya meletakkan fondasi kesis­teman dan kelembagaan yang bersifat jangka panjang agar Departemen (kini Kemen­terian) Pertahanan dan Mar­kas Besar TNI menjadi ins­titusi-instutusi yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran serta pengadaan alutsista (alat utama sistem persen­jataan), termasuk melakukan perumusan undang-undang di bidang pertahanan dan TNI.

Upaya pengembangan pos­tur militer Indonesia yang signifikan baru tampak pada tahun 2003 ketika Indonesia melakukan kontrak ($500 juta) pembelian persenjataan udara dengan Rusia (Sukhoi secara bertahap hingga ber­jumlah 10 unit pada tahun 2010) dan rencana pengadaan empat unit kapal selam. Tahun-tahun 2007 dan 2008 adalah masa penting bagi perkembangan arah kebijakan pertahanan Indo­nesia. Pada periode ini peme­rintah mengeluarkan sejumlah dokumen yang cukup lengkap dalam mengelola kebijakan pertahanan (kebijakan umum pertahanan negara, postur pertahanan, strategi perta­hanan, dan doktrin pertaha­nan). Kendati juga dilakukan pembelian bertahap kapal korvet kelas Sigma, 33 panser APS-2 (6X6), helikopter Mi-35 & Mi-17 serta 32 panser VAB dari Prancis untuk ope­rasi perdamaian di Libanon, tetapi, dari segi magnitude (besaran), upaya Singapura dan Malaysia tampak jauh lebih menyeluruh dan berlipat-ganda.[[1]](#footnote-1)

Selain itu, berbagai indus­tri strategis domestik yang dimi­liki Indonesia tampaknya belum secara penuh men­dukung kebutuhan alutsista bagi ketiga angkatan. PT Pindad, salah satu industri strategis yang memang secara khusus menghasilkan produk bagi alutsista angkatan darat, cukup memperlihatkan pro­duk­tivitas yang berarti. Itu pun masih dalam sebagian peralatan yang berteknologi rendah dan menengah. Semen­tara, industri strategis yang menghasilkan persenjataan guna mendukung postur ang­katan laut, yakni PT PAL, masih jauh dari harapan. Hal yang sama juga terjadi di PT DI (Dirgantara Indonesia) yang belum memberikan sumba­ngan signifikan bagi postur pertahanan udara.

Aspek dana, pelembagaan riset dan pengembangan (R&D), serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendu­kung produktivitas merupakan kendala yang sangat men­dasar. Karenanya, bila yang menjadi sasaran dalam jang­ka panjang adalah kemandirian industri strategis untuk men­dukung sektor pertahanan, maka Indonesia harus secara cepat mengatasi kendala-kendala itu. Hal yang paling krusial dan penting untuk dibenahi adalah aspek SDM. Indonesia harus semakin memperbanyak lulusan di bidang teknik perkapalan dan pesawat terbang yang ber­kualitas global, tentunya dengan tidak mengabaikan upaya pengembangan SDM yang mendukung teknologi militer. Ini secara perlahan juga dapat mengatasi keter­gan­tungan Indonesia pada teknologi luar negeri mengi­ngat Indonesia hanya baru mampu mengembangkan tek­nologi pada tingkat rendah dan menengah.[[2]](#footnote-2)

Dilema keamanan yang terjadi di Asia Tenggara masih berada pada tingkat ‘kompetisi persenjataan’ kon­vensional, belum pada level perlombaan senjata yang sengit. Bila membandingkan aspek kuantitas persenjataan yang dimiliki negara-negara di Asia Tenggara, baik oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara masing-masing, Indonesia secara umum masih tertinggal. Inheren di dalam hal tersebut, sejumlah kendala seperti anggaran yang minim (rata-rata masih di bawah 1% dari Produk Domestik Bruto/PDB), pelembagaan dan pendanaan R&D yang belum sempurna, serta ganjalan embargo per­sen­jataan dari Amerika Seri­kat yang pernah terjadi hingga tahun 2005 merupakan serang­kaian tantangan yang dihadapi pemerintah In­do­nesia.

Jika anggaran yang menja­di kendala utama dalam pengembangan postur perta­hanan Indonesia, maka upaya ke arah peningkatan PDB menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan usaha melipat-gandakan besaran PDB, persentase besaran anggaran pertahanan diharap­kan juga dapat ditingkatkan hingga menuju tingkat wajar dan ideal dari kerangka kebi­jakan MEF (Minimum Essen­tial Force) yang dianut Indonesia. Tanpa lompatan yang berarti ke arah itu, paling tidak sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan sangat jauh tertinggal di tingkat kawasan mengingat pemba­ngunan postur militer sebuah negara membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Penulis berargumen, kebi­ja­kan pembangunan postur pertahanan Indonesia (darat, laut, dan udara) dalam meres­pon pembangunan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 1998-2010 lebih dimak­sudkan untuk mencapai ke­kuatan *deterren*t daripada membangun kekuatan *ofensif*. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat adanya persepsi bahwa negara-negara di kawa­san Asia Tenggara berpotensi untuk mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Sementara, kemampuan In­donesia untuk membangun kekuatan militer di atas tingkat deterrent sangat ter­batas. Keterbatasan sumber dana dan dukungan politik serta kelemahan dalam me­nga­nalisis perkembangan lingkungan strategis kawasan menyebabkan kebijakan terse­but tidak mencapai tingkat deterrent dan juga belum sampai pada titik ‘*strategic stability’*.

Jika yang menjadi uku­ran perbandingan adalah jumlah persenjataan militer, Indonesia bahkan belum men­capai apa yang disebut seba­gai *strategic stability* di kawa­san Asia Tenggara. Kemung­kinan terburuk atau risiko yang akan dipikul oleh Indo­nesia adalah ‘potensi’ agresi dari negara lain yang semakin membesar karena merasa memiliki postur militer yang lebih kredibel daripada Indo­nesia. Kondisi di Asia Teng­gara yang baru sampai pada tingkat kompetisi persen­jataan ini akan mengarah ke dilema keamanan ‘yang keras’, yaitu perlombaan senjata, manakala Indonesia, sebagai negara yang terbesar dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melakukan upaya ‘gebrakan’ penguatan postur pertahanannya dengan kualia­tas dan kuantitas yang signi­fikan.

Namun demikian, dalam konteks yang lebih makro, penguatan postur pertahanan oleh Indonesia bukan tanpa konsekuensi. Hal ini justru akan berimplikasi kepada respon negara-negara lain yang juga akan merasa terancam. Upaya Indonesia akan me­munculkan rasa takut dan ancaman bagi negara-negara lain, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali meres­pon dengan melakukan pe­nguatan postur pertahanan. Konsekuensinya, spiral aksi-reaksi dan dilema keamanan di Asia Tenggara akan me­ningkat tajam. Bisa jadi, status quo yang ada sekarang (hingga tahun 2010) dipandang sebagai suatu *strategic stability*karena terbukti belum pernah terjadi perang di tingkat kawasan ataupun eskalasi ketegangan yang mengarah ke kondisi hubungan yang lebih buruk. Atau, mungkin saja, bila ada lompatan besar Indonesia dalam melakukan penguatan postur di suatu masa tertentu akan menyulut rasa tidak aman bagi negara-negara lain dan mengarah kepada perlom­baan senjata yang lebih in­tens.

Lebih spesifik, bila dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang, paling tidak hingga tahun 2024, Indonesia secara bertahap memperkuat postur pertahanan sembari meningkatkan besaran PDB-nya, hal ini juga bukan tanpa masalah dalam konteks perim­bangan kekuatan di tingkat kawasan. Penulis menengarai, spiral aksi-reaksi justru akan terjadi dengan lebih serius lagi karena melibatkan Indo­nesia yang hampir sepuluh tahun belakangan tidak begitu gencar mengembangkan kemam­puan dan kekuatan militernya. Dengan kata lain, melalui pertumbuhan ekonomi Indo­nesia yang stabil dan diba­rengi dengan peningkatan besaran PDB, kemudian alo­kasi untuk anggaran pertaha­nan bagi pembelian alutsista juga meningkat, ini diprediksi dapat mengarah kepada dile­ma keamanan di kawasan. Perkiraan ini didasarkan pada perhitungan dalam konteks politik internasional karena Indonesia adalah negara de­ngan posisi strategis secara geografis dan demografis yang dapat mengancam eksistensi negara-negara kunci seperti Singapura dan Malaysia. Memang, dengan upaya itu, di satu sisi, dalam hal kuan­titas persenjataan, apa yang disebut sebagai strategic stability dapat tercapai.Namun, di sisi lain, kompetisi persenjataan di masa depan juga menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kondisi kom­petisi menuju perimbangan yang tidak kunjung usai ini niscaya dapat ditangani me­lalui CBMs (Confidence Building Measures) dengan arti bahwa masing-masing negara secara sadar menyepakati aspek kualitas dan kuantitas persenjataan yang dimiliki, antara lain dengan tukar-menukar data rencana pemba­ngunan pertahanan. Hal ini penting mengingat pertaha­nan-keamanan di Asia Teng­ga­ra cukup riskan bila tidak dikelola dengan melibatkan semua negara di kawasan ini.[[3]](#footnote-3)

Santer diberitakan, peme­rintah Indonesia berencana membeli 100 unit MBT (*Main Battle Tank*) bekas jenis Leopard dari Belanda dengan anggaran mencapai $280 juta. Dengan anggaran yang cukup fantastis itu, Indonesia lebih relevan untuk membeli pesa­wat tempur (seperti 6 unit Sukhoi yang kini tengah diper­bincangkan) atau kapal perang yang baru. Walaupun dengan jumlah yang tidak begitu banyak, tetapi jika kualitas­nya mumpuni, maka secara umum dipandang cukup mem­pertangguh postur pertahanan dan daya tangkal Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, sebagai negara kepulauan yang terluas di kawasan Asia Tenggara, lapis pertama pertahanan Indonesia adalah laut dan udara, dengan tidak menga­baikan pertahanan daratnya.

Kondisi pertahanan negara pada tahun 2005 diwarnai dengan adanya beberapa kasus yang dianggap dapat berpengaruh terhadap wibawa dan integritas negara baik dalam lingkup internasional maupun kawasan regional. Dalam lingkup internasional, peningkatan kerjasama militer Amerika Serikat – Australia dalam memerangi terorisme, di samping mengingatkan pentingnya penanggulangan terorisme, kedua negara juga memberikan dukungan kepada pemerintahan yang sedang berkuasa di kawasan Asia Tenggara terutama Indonesia dan Filipina. Bagi Indonesia, bentuk dukungan tersebut diantaranya berupa peningkatan kerjasama militer Indonesia – Amerika Serikat dan pencabutan embargo suku cadang dan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Selanjutnya, peningkatan kerjasama pemeliharaan keamanan kawasan juga dilakukan oleh China dan Jepang. Sebagai negara yang sedang tumbuh menjadi negara maju, China secara simultan telah meningkatkan anggaran pertahanannya guna mendukung upaya pembangunan di negaranya. Sementara itu, sesuai proposal Amerika Serikat tentang transformasi aliansi Amerika dan Jepang, diperkirakan akan terjadi perubahan peran pasukan bela diri Jepang dalam memelihara stabilitas keamanan kawasan.[[4]](#footnote-4)

Dalam lingkup regional, pada tahun 2006 masih diperlukan perhatian yang serius pada permasalahan potensi konflik wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Philipina, China, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Kasus Blok Ambalat yang mengemuka pada awal tahun 2005 meskipun tidak sampai memicu perang antara Indonesia dan Malaysia, namun hal tersebut telah menimbulkan situasi yang kurang harmonis dalam hubungan kedua negara. Pengerahan sejumlah kapal perang oleh kedua belah pihak di sekitar perairan Ambalat merupakan bentuk pernyataan klaim atas blok Ambalat. Melalui kerangka kerjasama perbatasan (*General Border Committee*), kasus Ambalat secara intensif telah memasuki tahap pembahasan teknis di tingkat kementerian terkait. Selanjutnya, kasus penembakan tiga warga sipil oleh aparat keamanan Timor Leste merupakan salah satu rangkaian kasus pelanggaran perbatasan. Hal ini dapat terjadi karena aparat keamanan Timor Leste belum dapat terlepas secara total dari UNTAET sehingga seringkali bertindak di luar koridor kerjasama perbatasan (*Joint Border Committee* Indonesia – Timor Leste), sementara di sisi lain Indonesia masih berupaya menahan diri untuk tidak berbuat serupa guna mengangkat perbaikan citra Indonesia di dunia Internasional.

Dari kondisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa sistem pertahanan Indonesia tidak mungkin terlepas dari pengaruh sistem pertahanan asing baik dalam lingkungan internasional maupun kawasan regional. Namun, masih lemahnya kondisi sistem pertahanan Indonesia mengakibatkan rendahnya daya penggentar terhadap sistem pertahanan asing yang dimanifestasikan dalam bentuk pelanggaran integritas dan kedaulatan NKRI. Meskipun embargo suku cadang dan alutsista TNI sudah dicabut oleh pemerintah Amerika Serikat, hal tersebut hanya bermanfaat bagi pengoperasian sebagian alutsista. Pada tahun 2006 secara kuantitas belum terjadi peningkatan peralatan alutsista, mengingat kegiatan pengembangan materiil difokuskan pada peningkatan kesiapan operasionalnya. Pada saat ini kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi ”*under capacity*”, bahkan apabila disejajarkan dengan sesama anggota negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi terbawah. Rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi baru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit, hanya 1.077 unit (60,99 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan motor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, yang siap dioperasikan sebanyak 40.063 unit (85,04 persen); dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya 31 unit (50,82 persen) yang siap untuk dioperasikan. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya 61 unit (53,51 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan tempur Marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, yang siap dioperasikan hanya 157 unit (36,09 persen); dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya 17 unit (31,48 persen) yang siap untuk dioperasikan. Sedangkan untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya 126 unit (48,65 persen) yang siap untuk dioperasikan dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya 3 unit (18,75 persen) yang siap untuk dioperasikan. Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut maupun udara, maka kuantitas, kualitas serta kesiapanoperasional alat utama sistem senjata (alutsista) sebesar itu sangat muskil untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara secara optimal.

Sementara itu, anggaran pertahanan sampai dengan tahun 2006 baru mencapai 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto atau 5,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sisi lain, Singapura sebagai negara pulau telah mengalokasikan anggaran pertahanan nasionalnya mencapai 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto atau 21 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya. Dalam periode lima tahun ke depan untuk membangun postur pertahanan pada tingkat ’*minimum essential force*’ anggaran pembangunan pertahanan seharusnya mencapai 3 – 4 persen dari Produk Domestik Bruto. Rendahnya anggaran pertahanan ini menyebabkan upaya-upaya peningkatan kemampuan kekuatan pertahanan sangat sulit dilakukan. Padahal diplomasi luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional secara signifikan memerlukan dukungan kekuatan pertahanan yang memadai.

Meskipun masih dalam skala rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan mulai mengarah kepada pembentukan *minimum essential force*. Upaya peningkatan kemampuan alutsista TNI telah dilakukan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal. Peningkatan kemampuan alutsista TNI dirpioritaskan pada perpanjangan usia pakai melalui *repowering* atau *retrofit*. Hal ini akan dilanjutkan pada tahun 2007 sebagai langkah yang strategis dalam upaya mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasionalkan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan. Di samping itu, upaya modernisasi alutsista, khususnya pertahanan udara, juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Rusia yang modernitasnya setingkat dengan teknologi Eropa dan Amerika Serikat. Pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri senantiasa ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara yang menganut sistem pertahanan negara semesta. Antusias masyarakat untuk turut serta dalam mempertahankan wilayah khususnya pada masalah perbatasan, mengindikasikan masih tingginya semangat bela negara. Namun, partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan belum dapat terarah dengan baik mengingatbelum tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan. Di sisi lain, dibutuhkan biaya yang besar untuk melatih dan mendidik masyarakat sehingga siap untuk dikerahkan dalam sistem pertahanan. Oleh karena itu, pada tahun 2007 peran aktif dari para tokoh masyarakat dan agama diharapkan semakin meningkat seiring dengan upaya peningkatan kegiatan bela negara bagi pemuda dan masyarakat di daerah rawan konflik dan wilayah perbatasan.

Berkenaan dengan kondisi umum tersebut di atas, maka tantangan yang dihadapi pembangunan nasional tahun 2007 adalah bagaimana memenuhi kebutuhan alutsista TNI untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pada tingkat *minimum essential force* dengan tidak menggantungkan alutsista luar negeri. Selanjutnya, bagaimana dengan skala kekuatan minimum tersebut alutsista yang ada mampu dimanfaatkan untuk operasi militer selain perang seperti operasi bakti, evakuasi atau rehabilitasi bencana alam serta di masa krisis mampu meredam berbagai ancaman pertahanan baik yang berasal dari dalam negeri maupun ancaman luar negeri. Selain itu, upaya mendayagunakan potensi pertahanan negara dengan meningkatkan peran aktif masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, khususnya kendala dari aspek legalitas dan aspek finansial.

Terkait Postur Militer Indonesia:

* **Alutsista**

inilah daftar alutsista terbaru yang sudah dan akan dimiliki oleh TNI.[[5]](#footnote-5)

|  |
| --- |
|  |
| TNI AU |
| 12 Pesawat coin Super Tucano (pesan 16 unit, 4 sudah datang)16 Jet tempur Golden Eagle (sudah datang semuanya Jan 2014)8 Jet tempur F16 setara blok 52 (jumlah pesanan 30 F16 upgrade)5 Pesawat angkut sedang CN295 (pesan 9 unit, 5 sudah diterima thn 2013)8 Pesawat angkut berat Hercules (pesan 9 unit, 1 sudah diterima thn 2013)6 Helicopter Cougar6 UAV Heron4 Radar Thales1 Simulator Sukhoi |
|  |
| TNI AL |
| 37 Tank amfibi BMP3F (sudah datang dan diserahkan resmi Jan 2014)25 Kendaraan amfibi LVTA1 dari Korsel (hibah batch 2)5 Tank amfibi jenis BTR-4 (Pesanan sebanyak 55 unit)10 MLRS RM Grad11 Helikopter anti kapal selam Panther4 Pesawat intai maritim CN235 MPA4 Helicopter angkut Bell 412 Ep3 Kapal perang light fregat “Bung Tomo Class”3 Kapal perang jenis KCR (Kapal Cepat Rudal) 60 m2 Kapal perang jenis KCR 40 m3 Kapal perang jenis LST (Landing Ship Tank)2 Kapal perang jenis BCM (Bantu Cair Minyak)3 Kapal perang jenis patroli cepat1 Kapal perang jenis latih layar2 Kapal selam Kilo2 Kapal hydrografi |
|  |
| TNI AD |
| 103 MBT Leopard II50 Tank Marder38 Howitzer Digital Caesar Nexter36 MLRS Astross II Mk6900 Truk angkut pasukan800 Rantis80 Panser Anoa5 Battery Rudal Starstreak5 Battery Rudal Mistral180 Rudal Anti Tank Javelin150 Rudal Anti Tank Nlaw20 Helikopter Bell 412Ep (6 sudah diserahkan)16 Helikopter Fennec6 Helikopter Mi17  |

Berikut yang dalam proses pembuatan dan dalam proses pengadaan.

|  |
| --- |
| Proses Pembuatan |
| 3 kapal selam Changbogo di Korsel2 kapal perang jenis PKR di Belanda (opsi sampai 10 unit)8 Helicopter Apache1 kapal latih layar buatan Spanyol (pengganti Dewaruci) |
| Proses Pengadaan |
| 16 jet tempur Sukhoi SU356 kapal selam Kilo12 Helikopter Blackhawk |

Berikut MEF 2 (2015-2019)

|  |
| --- |
| Proses Pembuatan |
| Pengadaan satelit militer · Penerapan KogabwilhanPemenuhan alutsista 3 Divisi MarinirPemenuhan alutsista 3 Divisi KostradPengadaan sistem jaringan pertahanan udara strategisPengadaan peluru kendali SAM jarak sedangPengadaan peluru kendali SAM jarak pendekPembelian 2-3 kapal perang jenis DestroyerPembelian 5-6 kapal perang jenis FregatPengadaan 2 kapal perang jenis LPD atau LHDLanjutan Proyek PKR 10514 dengan 4 opsi kapal perangLanjutan Proyek KCR 60 m dengan opsi 6 kapal perangLanjutan Proyek KCR 40 m dengan opsi 6 kapal perangPenyelesaian 3 kapal selam ChangbogoKedatangan 6 kapal selam KiloKedatangan 1 skuadron jet tempur Sukhoi SU35Penambahan 1 skuadron jet tempur (Gripen, Rafale, Typhoon)Produksi bersama peluru kendali anti kapal C705Pengembangan varian peluru kendali C705Pengembangan Roket Rhan jarak tembak 100 kmPembelian 7 pesawat CN295 batch 2Pembelian 3 pesawat AEWPembelian 2 pesawai intai strategisPembelian 200 MBT (Main Battle Tank)Produksi 100 Tank medium PindadPembelian MLRS Astross batch 2Pembelian 100 Panser Anoa Pembelian 100 Tank amfibi BMP3F  |

* **Latihan Militer**

Latihan Militer Indonesia dilakukan secara berkala berdasarkan angkatan masing-masing, serta biasanya tiap tahun diadakan latihan militer gabungan antara angkatan udara, laut, serta darat.

* **Military Budget**

Military Budget Indonesia pada tahun 2012 sekitar: Defense Budget $4,740,000,000, Dari data diatas beberapa catatan bisa kita letakkan pada kondisi terkini, misalnya posisi cadangan devisa RI saat ini sudah mencapai $ 122.000.000.000,- , jumlah KRI saat ini berkisar 152 unit. Kapal-kapal yang berstatus KAL, KKP dan Polisi Air tidak diperhitungkan oleh GFP, padahal kapal-kapal jenir ini ikut berperan dalam patroli keamanan laut atau patroli pantai (Patrol Coastal Craft). Kemudian komponen cadangan (Active Military Reserves) jumlahnya bisa melebihi perhitungan GFP jika Satuan Pengamanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pertahanan Sipil masuk dalam perhitungan.[[6]](#footnote-6)

Analisis GFP yang disajikan merupakan evidence yang cukup obyektif dan terbarukan, mampu menyajikan data terkini yang memberikan gambaran menyeluruh dari kekuatan militer sebuah negara berdasarkan kekuatan sumber daya militer, sistem persenjataan, kekuatan armada angkatan laut, dukungan logistic dan sebaran pangkalan, sumber daya alam untuk survival, dukungan financial dan kondisi geografis. Yang menarik kekuatan pesawat tempur digabung dengan sistem persenjataan lain apakah itu pesawat angkut, helikopter, tank, panser, artileri yang menjadi kekuatan angkatan darat. Sementara kekuatan angkatan laut menjadi faktor terpisah dan memberikan kontribusi real pada kekuatan militer sebuah negara.

* **Jumlah Pasukan**

Jumlah Pasukan Indonesia yang tersedia adalah 129,075,188[[7]](#footnote-7)

* + 1. **Postur Militer Amerika Serikat**

Paska perang dunia kedua Amerika Serikat menjadi negara yang mengambil tanggung [jawab](http://husnulmurtadlo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-66889-Umum-Respon%20Amerika%20Terhadap%20%20Kekuatan%20Baru%20China.html) dalam menciptakan perekonomian pasar dunia yang liberal karena keadaan paska perang eropa dimana jepang dalam kehancuran dan Inggris yang kelelahan membutuhkan kekuatan lain yang untuk menjalankan peran global tersebut. Menyusul runtuhnya Uni Soviet menandakan perubahan kekuatan ke sistem unipolar yang didominasi oleh Amerika Serikat. Power AS didasarkan pada kapabilitas militer dan ekonomi yang dimilikinya. Oleh karena itu, peran AS dalam politik global sangat besar untuk menjaga stabilitas ekonomi-politik internasional. Kegagalan juga bisa dialami oleh sebuah negara besar ketika negara dominan tidak mampu untuk mempertahankan kapabilitasnya. Seperti halnya yang terjadi pada Inggris sebelum PD II. Selain itu, kebangkitan China menjadi tanda adanya perubahan kekuatan yang menggeser pengaruh AS yang telah lama menjaga stabilitas ekonomi-politik internasional.[[8]](#footnote-8)

Power negara merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam [studi](http://husnulmurtadlo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-66889-Umum-Respon%20Amerika%20Terhadap%20%20Kekuatan%20Baru%20China.html) politik dunia, Hal ini berkaitan dengan dengan negara secara tradisioanl dianggap sebagai jenis yang paling penting dari organisasi politik dalam sistem global. Power dalam prespektif realis merupakan konsep sentral. Hal ini berkaitan dengan aksi negara dalam politik [internasional](http://husnulmurtadlo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-66889-Umum-Respon%20Amerika%20Terhadap%20%20Kekuatan%20Baru%20China.html). Negara mengejar kepentingan nasionalnya sebagai alasan dibalik setiap tindakan negara. Maksimalisasi power adalah kepentingan suatu negara. Dengan demikian tindakan negara dapat dijelaskan dengan keinginannya untuk mempertahankan, perlindungan, atau meningkatkan power dalam hubungannya dengan negara lain sebagai respon rasional pada kondisi politik internasional yang anarki. Kondisi anarki mengartikan bahwa secara alami negara-negara bersaing satu sama lain, untuk itu negara harus melakukan [strategi](http://husnulmurtadlo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-66889-Umum-Respon%20Amerika%20Terhadap%20%20Kekuatan%20Baru%20China.html) self-help dalam melindungi kepentingannya. Pertahanan dan perlindungan diartikan sebagai kekuatan militer yang menjadi komponen power . Sehingga kondisi mendorong Negara melihat adanya kesempatan untuk meningkatkan power mereka unutk menghadapi Negara lain. kondisi kondisi politik internasional yang anarki ini menjadi ruang dari *struggle of power*.

Kemampuan militer yang luas mungkin memang merefleksikan sumber daya ekonomi negara. Realis mengakui bahwa sumber daya ekonomi jelas dibutuhkan untuk mendanai militer yang cukup besar dan baik dan untuk membeli sejumlah besar senjata berteknologi canggih. Kapasitas ini menunjukkan kemampuan negara untuk menghasilkan kelimpahan perangkat keras militar untuk melakukan peperangan yang panjang dan senjata yang didasarkan pada teknologi canggih .
    Kekuatan ekonomi sangat penting dimana sumber-sumber ekonomi merupakan penentu [utama](http://husnulmurtadlo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-66889-Umum-Respon%20Amerika%20Terhadap%20%20Kekuatan%20Baru%20China.html) kekuatan negara dan memiliki potensi untuk mempengaruhi. Selain kemampuan untuk mendanai upaya perang, ekonomi bahkan menjadi lebih penting daripada kekuatan militer pada era politik global saat ini. liberalisme menyatakan bahwa kekuatan militer bukanlah sarana yang efektif untuk mempengaruhi isu-isu nonmiliter seperti perdagangan dan masalah lingkungan yang telah menjadi semakin penting bagi negara-negara di era saling ketergantungan. Bahkan jika ada masalah berkaitan dengan militer,  penggunaan militer dapat membahayakan ekonomi suatu negara. Dengan alasan ini, kaum liberal berpendapat bahwa ekonomi adalah bentuk paling penting dari power negara. Dengan ekonomi yang kuat negara dapat memiliki pengaruh dengan mengancam untuk menyakiti yang lain secara ekonomi seperti sanksi perdagangan atau pemotongan investasi bahkan jika tidak memiliki kemampuan militer yang besar .

Dalam pandangan realis, ekonomi memang jelas dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan militer dan sebaliknya kekuatan militer juga bisa digunakan untuk menjaga kekayaan ekonomi atau untuk mendapatkan kekayaan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini juga ditambahkan oleh pendapat teori ketergantungan bahwa kontrol persenjataan di dunia dan pengendalian organisasi keamanan internasional akan membantu menjaga ekonomi dari kerugian . hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan militer dan ekonomi keduanya dapat dipertukarkan.

Selain kekuatan militer dan ekonomi yang disebut sebagai Hard power, ada cara yang lebih lembut dan efektif atau tidak langsung untuk suatu negara mencapai hasil yang diinginkan dalam politik dunia yaitu co-optive atau soft power. Soft power diletakkan pada sumber daya seperti ide-ide atau kemampuan untuk mengatur agenda politik dengan cara membentuk preferensi. Kemampuan untuk menetapkan preferensi cenderung dihubugkan dengan sumber daya yang tidak berwujud seperti budaya, ideologi dan institusi .
    Dalam hal ini, Joseph Nye berpendapat bahwa Amerika serikat memiliki soft power dalam bentuk kekuatan budaya (seluruh dunia menonton film hollywood), dalam bentuk agenda-setting power- Amerika Serikat mampumengatur lembaga-lembaga international  seperti IMF dan PBB dimana setelah perang dunia ke dua AS terus mendominasi forum dunia ini. Dapat dilihat bahwasanya untuk menjadi negara yang power full, sebuah negara harus mempunyai soft power dan hard power. Adam Watson menjelaskan hal ini mengarah pada dua maksud yakni; pertama, negara harus bisa melakukan dsitribusi kekuatan dalam sebuah sistem tidak hanya kekuatan militer tetapi juga kekuatan financial. Yang kedua, dominasi terhadap ide atau asumsi seperti halnya ideologi, liberalisme ekonomi dan globalisasi. Modal ini yang digunakan untuk mempengaruhi kebijakan eksternal negara-negara lain. hal ini kemudian yang menjadi pertimbangan atas dominasi AS saat ini .

* 1. **Hubungan Indonesia-Amerika Serikat di bidang Politik dan Keamanan**
		1. **Bidang Politik**

Hubungan RI-Amerika Serikat (AS) telah terbina sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Secara resmi, hubungan diplomatik kedua negara ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara. Tanggal 28 Desember 1949, AS membuka Kedutaan Besar di Jakarta dan menunjuk Duta Besar AS pertama untuk Indonesia, Horace Merle Cochran. Tanggal 20 Februari 1950, Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar RI pertama untuk AS.[[9]](#footnote-9)

Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia merupakan hubungan love and hate relationship; suatu ketika Indonesia bisa sangat dekat dengan Amerika Serikat dan di lain waktu hubungan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi renggang. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dimulai dari jaman Presiden Soekarno ,pada waktu itu Soekarno sangat menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam permasalah politik dalam negeri Indonesia. Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Soekarno juga memiliki reservasi tersendiri tentang Indonesia.

Soekarno yang beraliran NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) tidak sejalan dengan pola Pemerintahan Amerika Serikat yang mengutamakan demokrasi dan liberalisasi. Soekarno mengimbangi dengan membuat hubungan kedekatan dengan Uni-Sovyet. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat mulai menanam pengaruhnya di Indonesia untuk menggulingkan Soekarno. Agen-agen CIA Amerika Serikat menyusup ke dalam kelompok pemberontak di Indonesia untuk mengacaukan pemerintahan Soekarno .Hingga puncaknya terjadi peristiwa G30S/PKI yang merupakan upaya Amerika Serikat untuk menggulingkan Presiden Soekarno.

Naiknya Presiden Soeharto sebagai Presiden Indonesia membawa angin segar dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Soeharto merupakan Jendral TNI yang pro  kebijakan Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, yang terpenting adalah  negara-negara di dunia tidak menganut paham komunisme, sehingga keterbukaan Presiden Soeharto akan demokrasi dan liberalisasi disambut baik oleh Amerika Serikat.. Soeharto bersikeras akan penyerangan terhadap Timor-Timur karena di wilayah tersebut terdapat partai Fretlin yang berkiblat pada aliran Komunisme.

Dengan alasan demi mencegah penyebaran komunisme di wilayah tersebut, Soeharto meminta restu Amerika Serikat untuk menyerang wilayah Timor-Timur. Amerika Serikat yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden Ford memberikan restu kepada Indonesia untuk menginvasi wilayah Timor-Timur. Operasi Saroja dimulai pada tahun 1976 dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh komunisme di wilayah tersebut. Invasi Indonesia didukung penuh oleh Amerika Serikat yang memberikan bantuan alutsista demi kelancaran operasi Saroja. Bantuan dari Amerika Serikat terus berdatangan dalam berbagai bentuk mulai dari penjualan alutsista hingga pelatihan dan pendidikan militer. Cikal bakal penjatuhan embargo senjata oleh Amerika Serikat berawal dari keputusan Presiden Soeharto untuk menyerang wilayah Timor-Timur yang dulunya merupakan wilayah jajahan Portugis

Runtuhnya Uni-Sovyet sebagai lawan dari kekuata Super Power mengubah kancah geo politik Internasional Amerika Serikat dan dunia mulai mempertanyakan penyerangan Indonesia terhadap Timor-Timur. Peristiwa penembakan di Geraja Santa Cruz dan Balibo five menjadi hambatan bagi keberlangsungan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terutama dalam bidang militer. Amerika Serikat menghentikan program pelatihan militer (IMET) terhadap perwira Indonesia.

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan Presiden Soeharto turun dan digantikan oleh Presiden Habibie. Dalam masa jabatan Presiden Habibie yang singkat (selama satu tahun), pemerintah Indonesia atas desakan asing memberikan referendum kepada rakyat Timor-Timur untuk menentukan masa depan negaranya. Hasil dari referendum tersebut adalah merdekanya Timor-Timur dari Indonesia. Setelah referendum yang dimenangkan oleh rakyat Timor-Timur, Kopasus dan kelompok Militia yang pro Indonesia melancarkan aksi-aksi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berati di Timor-Timur. Akibat dari kekacauan yang disebabkan oleh Kopasus dan kelompok para military  Timor-Timur, terjadi exodus besaran-besaran warga Timor-Timur yang menghindari konflik di negaranya. Banyak masyarakat Timor-Timur yang menjadi korban akibat tindakan dari Kopasus dan kelompok para military  Timor-Timur pro Indonesia.

Akibat dari perbuatan Kopasus, Amerika Serikat menjatuhkan embargo senjata terhadap Indonesia. Semasa embargo senjata berlangsung, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku cadang dan perawatan untuk operasional kendaraan tempur, baik angkatan Darat Laut dan Udara. Angkatan Udaralah yang paling parah terpengaruhi oleh kebijakan embargo senjata Amerika Serikat terhadap Indonesia. Pesawat angkut dan pesawat tempur yang dimiliki Indonesia terpaksa dihanggarakan. Tidak lama setelah Indonesia di embargo senjata oleh Amerika Serikat, Indonesia mengalami masalah konflik etnis di kepulauan Maluku. TNI mengalami kesulitan dalam bidang logistik akibat diberlakukan nya embargo senjata oleh Amerika Serikat.[[10]](#footnote-10)

Amerika mulai memperbaiki hubungan dengan Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Amerika memeprbaiki hubungan tersebut adalah:

1)      Peristiwa Bom Bali dan Terosrisme

Peristiwa bom Bali satu dan bom Bali 2 merupakan awal mula perbaikan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terutama dalam bidang militer. Presiden Bush ketika bertemu dengan Presiden Megawati di Bali mengungkapkan keinginanya untuk memberikan bantuan dalam penanggulangan tindak terorisme di Indonesia. Bencana Tsunami di Aceh juga membantu untuk memperbaiki hubungan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Usaha untuk memulihkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dilakukan tidak hanya oleh pihak Indonesia, tetapi oleh pihak internal Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan asing terus melobi pemerintah Amerika Serikat agar melanjutkan kembali hubungan militernya dengan Indonesia. Lockheed Martin dan Boeing yang sudah memiliki kontrak kerja dengan Indonesia terpaksa menghentikan sementara produksi alutsista dikarenakan kebijakan embargo senjata.

Perkembangan penting hubungan bilateral RI – AS ditandai dengan kunjungan Presiden Barrack Obama ke Indonesia pada tanggal 9 – 10 November 2010 dimana dalam kunjungan tersebut, kedua Kepala Negara telah meluncurkan secara resmi Comprehensive Partnership (CP) RI – AS.  Sebelum CP RI-AS resmi diluncurkan, pada tanggal 17 September 2010 telah dilaksanakan RI – US Joint Commission Meeting (JCM) pertama di Washington, D.C dipimpin Menlu masing-masing negara. Hal penting yang disepakati dalam JCM I di anataranya peluncuran Plan of Action for RI – US Comprehensive Partnership yang menjadi cetak biru panduan kerjasama kedua negara serta pembentukan enam Working Group (WG) di bidang  Democracy and Civil Society; Climate and Environment; Education; Trade and Investment; Security Issue; dan Energy.  Selanjutnya pada Joint Commission Meeting (JCM) ke-2 tanggal 24 Juli 2011 di Nusa Dua, Bali, Menlu kedua negara antara lain telah menghasilkan Joint Statement pengembangan visi strategik kerjasama RI-AS ke depan serta membahas berbagai potensi kerjasama maupun isu-isu kawasan.

* + 1. **Pertahanan dan Keamanan**

Kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 9-10 November 2010 di antaranya mencapai kesepakatan tentang Kemitraan Komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam Kemitraan Komprehensif, kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerjasama dalam delapan bidang, satu di antaranya adalah Kerjasama Keamanan dan Kawasan. Apabila dicermati, butir-butir kerjasama dalam bidang Keamanan dan Kawasan tidak lepas dari dinamika keamanan di kawasan Asia Pasifik, yang mana Amerika Serikat adalah masih berperan sebagai aktor utama.Terkait dengan hal itu, Indonesia harus dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kemitraan yang terjalin dengan Amerika Serikat, meskipun sebagian besar agenda dalam kemitraan di bidang Keamanan dan Kawasan sesungguhnya lebih banyak merupakan agenda yang mengacu pada kepentingan nasional Amerika Serikat. Indonesia, termasuk TNI Angkatan Laut, sebaiknya sejak dini sudah menyiapkan diri untuk mengisi dan mewarnai agenda kerjasama di bidang Keamanan dan Kawasan dengan Amerika Serikat.

Untuk dapat memahami secara komprehensif tentang kepentingan Amerika Serikat di kawasan, hendaknya mengacu pada Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat yang diterbitkan pada Mei 2010 dalam era administrasi Presiden Barack Obama. Strategi Keamanan Nasional ini menggantikan strategi serupa yang dipublikasikan oleh pemerintahan Presiden George H.W. Bush, Jr. Dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010, perlu pemahaman terhadap empat kepentingan nasional Amerika Serikat yang abadi. Keempat kepentingan tersebut mencakup keamanan, kesejahteraan, nilai-nilai dan tata internasional. Menyangkut bidang keamanan, agenda yang terkait langsung dengan kawasan Asia Pasifik adalah *Disrupt, Dismantle and Defeat Al’Qaida and it’s Violent Extremist Affiliates in Afghanistan, Pakistan and Around the World dan Reverse the Spread of Nuclear and Biological Weapons and Secure Nuclear Material*.[[11]](#footnote-11) Di kawasan ini, terdapat lima negara yang dikategorikan sebagai aliansi Amerika Serikat, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Filipina dan Thailand. Keempat negara itu sebagai tumpuan bagi keamanan dan fondasi kesejahteraan kawasan.

Terkait dengan isu keamanan, Amerika Serikat beserta sekutunya di wilayah Asia Pasifik bertekad untuk terus bekerjasama mengembangkan agenda keamanan yang positif di kawasan yang berfokus pada keamanan kawasan, memerangi proliferasi senjata pemusnah massal, terorisme, perubahan iklim, pembajakan internasional, epidemik dan keamanan dunia maya. Kerjasama tersebut dikembangkan seiring dengan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan.

Adapun kaitannya dengan Indonesia, dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010 Indonesia mendapat perhatian khusus dengan dicantumkannya ulasan tentang negara ini dalam satu paragraf tersendiri. Di situ dinyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra yang lebih penting untuk isu-isu kawasan dan lintas negara, seperti perubahan iklim, counterterrorism, keamanan maritim, pemeliharaan perdamaian dan bantuan bencana.

Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat sebaiknya dipandang dari perspektif yang demikian, khususnya dari sudut pandang kepentingan Amerika Serikat. Singkat kata, kemitraan kedua negara sesungguhnya berada dalam bingkai kepentingan nasional Amerika Serikat sebagaimana dirumuskan dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2010. Tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya terdapat pertemuan kepentingan antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam Kemitraan Komprehensif, namun seberapa optimal keuntungan yang dapat diraih oleh Indonesia sangat tergantung pada bagaimana cerdik membaca dan memanfaatkan situasi yang sudah given tersebut. Kembali kepada Kemitraan Komprehensif kedua negara di bidang Keamanan dan Kawasan, terdapat tiga agenda utama yaitu KTT Asia Timur, Defense Framework Agreement dan Kerjasama Keamanan. Defense Framework Agreement yang ditandatangani di Washington pada 10 Juni 2010 mengatur tentang sembilan bidang kerjasama Indonesia-Amerika Serikat, yaitu keamanan maritim, operasi pemeliharaan perdamaian, humanitarian assistance and disaster relief (HADR), industri pertahanan, Universitas Pertahanan Nasional, Kopassus, Laut Cina Selatan, counterterrorism, intelijen dan Afghanistan. Adapun Kerjasama Keamanan berfokus pada counterterrorism, keamanan maritim, pemeliharaan perdamaian, respon terhadap bencana alam dan bantuan kemanusiaan.[[12]](#footnote-12)

Sejumlah agenda di bidang Keamanan dan Kawasan yang disepakati kedua negara tidak lepas pula dari perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik diwarnai oleh isu kebangkitan militer Cina, disusul dengan beberapa isu lainnya seperti keamanan maritim, HADR dan counterterrorism. Dari beberapa isu tersebut, isu kebangkitan militer Cina telah menjadi perhatian bersama negara-negara di kawasan, terlebih lagi Amerika Serikat terus menghembuskan isu itu dalam stabilitas kawasan kontemporer. Dengan kata lain, Indonesia hendaknya cerdas membaca agenda kerjasama dalam Kemitraan Komprehensif guna menyiapkan diri menghadapi ekses yang mungkin terjadi di waktu-waktu mendatang.[[13]](#footnote-13)

Pasca pencabutan embargo militer tahun 2005, kerja sama pertahanan Indonesia–AS semakin membaik berkat persepsi positif pemerintah, militer dan parlemen AS terhadap proses reformasi TNI. Bantuan militer AS kepada Indonesia disalurkan melalui program Foreign Military Financing (FMF) dan International Military Education and Training (IMET), khususnya dalam rangka peningkatan kemampuan transportasi TNI dalam penanganan bencana alam serta program peningkatan profesional prajurit.

Sejak tahun 2002 terdapat forum pertemuan tahunan militer RI – AS ’Indonesia–United States Security Dialog (IUSSD) serta forum tahunan US–Indonesia Bilateral Defense Dialogue (USIBDD) yang dilaksanakan berselingan dengan IUSSD. Pertemuan USIBDD ke-11 berlangsung di Hawaii, AS tanggal 7-11 Februari 2011 sedangkan forum IUSSD ke-8 berlangsung tanggal 25-26 Mei 2010. Kerjasama keamanan RI – AS dikukuhkan melalui penandatanganan LoI between INP and FBI on Mutual Cooperation in Capacity Building and Combating Transnational Crimes pada bulan Maret 2011 yang melandasi kerjasama Badan Penyelidik Federal (FBI) AS dengan Polri (Densus 88) dalam pemberantasan terorisme. Sebelumnya, pada tanggal 8 November 2010 telah ditandatangani MoU between the Government of the UnitedStates of America and the Republic of Indonesia on Capacity Building to Strengthen the Security of Biological Pathogens yang menjadi landasan kerjasama pelatihan capacity building di bidang biosecurity dan biosafety guna memperkuat keselamatan laboratorium dan keamanan patogen dari akses illegal.

Penting untuk diingat bahwa sekarang Amerika Serikat membutuhkan banyak sekutu, kawan dan mitra di kawasan Asia Pasifik dalam rangka menghadapi kebangkitan militer Cina. Hal ini bisa dilihat dalam AUSMIN 2010 Joint Communique di Melbourne, Australia pada 8 November 2010 yang di antaranya menyangkut tentang perdamaian dan stabilitas, kebebasan bernavigasi, penghormatan terhadap hukum internasional dan penerapan aturan UNCLOS 1982 terkait dengan sengketa teritorial maritim di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Indonesia yang terletak pada posisi geopolitik yang strategis di kawasan tentu saja dibutuhkan pula oleh Amerika Serikat untuk dirangkul.

Peluang inilah yang semestinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan nasional Indonesia. Meskipun Indonesia tidak tergolong sekutu dan kawan Amerika Serikat, namun peran Indonesia sebagai mitra Amerika Serikat guna menghadapi kebangkitan militer Cina sangat diharapkan dan dinanti-nantikan. Mengingat bahwa Indonesia menjalin pula kemitraan strategis dengan Cina, dibutuhkan kelihaian berdiplomasi dengan Amerika Serikat agar dapat meraih keuntungan sebesar-besarnya dari Kemitraan Komprehensif. Di sinilah kecerdikan Indonesia untuk bermain di antara dua kekuatan besar yang saling berhadapan diperlukan.

Pada bulan November tahun 2005 Amerika Serikat secara resmi mencabut embargo senjata terhadap Indonesia. Pencabutan embargo senjata terhadap Indonesia. Alasan Amerika Serikat mencabut embargo senjata terhadap Indonesia adalaha Amerika Serikat merasa bahwa dalam kurung waktu embargo senjata dijatuhkan, Indonesia terlah banyak mengalami perubahan yang baik. Indonesia telah menjadi Negara yang lebih demokratis, hal ini ditunjukkan dengan berhasilnya di selenggarakan pemilu tahun 2004 secara jujur dan adil. Selain perubahan politis yang dialami oleh Indonesia, Amerika Serikat juga merasa bahwa Indonesia merupakan Negara yang menjadi sasaran serangan teroris. Peristiwa Bom Bali satu dan dua, serta serangkaian aksi-aksi terorisme yang terjadi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan mitra kerja global dalam menangani terorisme di Asia Tenggara.

Bencana Tsunami Aceh yang terjadi pada penghujunga tahun 2004 juga merupakan sebuah berkah bagi hubungan bilateral antar kedua Negara. Atas dasar kemanusiaan Amerika Serikat mencabut sebagian (partially lifting) embargo senjatanya terhadap IndonesiaAmerika Serikat membuka kembali jalur FMS (Foreign Military Sales) untuk suku cadang pesawat C-130 Hercules untuk membantu upaya penanggulangan bencana. Amerika Serikat juga memberikan bantuan sumber daya manusia yang berasal dari U.S Marines untuk membantu TNI dalam hal penanggulangan bencana di Aceh.

Naiknya Cina sebagai salah satu *New Emerging Power* di kawasan Asia Pasifik menjadi sebuah kekhawatiran Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa perlu mencari sekutu dalam menanggapi permasalah di era baru ini. Indonesia yang memiliki prioritas dan orientasi politik yang sama dan memiliki kebijakan politik bebas aktif (sehingga tidak memihak blok atau negara manapun) merupakan sasaran tepat bagi Amerika Serikat dijadikan mitra kerja.

Pengaruh dari pencabutan embargo Amerika Serikat terhadap Indonesia adalah jalur diplomasi yang sebelumnya terputus antara kedua Negara sekarang sudah kembali terbukan (walaupun belum seratus persen), Amerika Serikat mulai membuka kembali pelatihan militer IMET bagi perwira Indonesia untuk bersekolah di Amerika Serikat. Hasil dari IMET adalah perwira Indonesia dapat mengenyam pendidikan militer yang lebih advance dengan staff pengajar dan fasilitas pendudidikan yang lebih bagus daripada di Indonesia. Selain kembali terbukanya IMET bagi perwira Indonesia, Amerika Serikat juga kembali melangsungkan latihan militer bersama yang dijuluki Garuda Shield. Program Garuda Shield sudah berlangsung sejak tahun 2006. Tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kerja sama antara anggota CPX (*command Post Exercise)* kedua Negara. Latihan bersama garuda Shield meliputi taktik-taktik perang serta pengunaan alutsista buatan Amerika Serikat. Selain melatih kecakapan tentara Indonesia untuk berperang, Garuda Shield juga mengajarkan cara-cara penanggulangan bencana.

Pengaruh lain dari dicabutnya embargo senjata terhadap Indonesia oleh Amerika Serikat adalah kembali terbukanya jalur FMS (Foreign Military Sales) untuk kepentingan pemutakhiran alutsista Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Kolonel Wajariman, jumlah pengiraman senjata Amerika Serikat telah meningkat significan dari tahun 2006 hingga 2012, hal tersebut terbukti dari peningkatnya biaya kirim alutsista dari puluhan ribu U.S dollar pada tahun 2006-2007 menjadi ratusan ribu U.S dollar pada tahun 2009-2012. Amerika Serikat juga telah bersedia menghibahkan sejumlah 28 unit pesawat tempur F-16 kepada Indonesia, pesawat tersebut merupakan pesawat preservasi Amerika Serikat yang sudah tidak digunakan lagi oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Kelanjutan hubungan militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat juga membawa dampak positif bagi perusahaan alutsista Amerika Serikat. Indoneisa sangat bergantung dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan suku cadang serta perawatan untuk ranpur.

Dalam hal hubungan Amerika Serikat dengan Kopasus, juga mengalami perbaikan setelah dicabutnya embargo senjata terhadap Indonesia. Amerika Serikat masih menyimpan reservasi untuk Kopasus. Reservasi Amerika Serikat menyebabkan pada tahun 2005 ketika embargo senjata secara resmi dicabut oleh Amerika Serikat, Kopasus masih terkena dampak embargo tersebut. Pada kujungan Secretary of Defense Amerika Serikat Robert Gates ke Jakarta, embargo terhadap Kopasus mulai perlahan mulai dicabut. Amerika Serikat akan mencabut embargo senjata terhadap Kopasus secara perlahan sembari mengkaji progress yang dilakukan oleh Kopasus. Namun sebenarnya Amerika Serikat mengerti pentingnya Kopasus dalam upaya mencegahan terorisme di Indonesia.

Dalam hal menanggulangi penyebaran terorisme di Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia telah mengadakan kerja sama melalui IMET dan Garuda Shield untuk melatih TNI menghadapi bahaya terorisme di kawasan Asia Pasifik. Pembukaan kembali hubungan Amerika Serikat dengan Kopasus juga didasari bahwa kopasus merupakan pasukan khusus Indonesia yang menangani permasalahan terorisme, sehingga cepat atau lambat pemerintah Amerika Serikat harus kembali melanjutkan hubngan. Pemasangan instalasi radar di wilayah Indonesia juga telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Pemasangan radar di di lepas pantai Sulawesi dan Selat Malaka bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pengawasan Indonesia terhadap tindakan-tindakan terorisme yang terjadi di wilaya Tri-Border Region antara Indonesia Malaysia dan Filipina.

Ke empat hal di atas merupakan pengaruh langsung dari dihapuskannya Embargo Senjata terhadap Indonesia; Dari sisi lalin sebenarnya terlihat bahwa kedekatan kembali Amerika Serikat terhadap Indonesia setelah diangkatnya embargo senjata menunjukkan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia merupakan salah satu bentuk dari kebijakansecurity cooperation yang bertujuan untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat yang berupa kebijakan politik serta strategi pertahanan dan keamananya. Selain itu, kebijakan security cooperation juga digunakan unruk melindungi asset-asset Amerika Serikat yang terdapat di Indonesia seperti FreePort McMoran di Papua dan Exxon Mobile di Aceh.

Pasca pencabutan embargo militer tahun 2005, kerja sama pertahanan Indonesia–AS semakin membaik berkat persepsi positif pemerintah, militer dan parlemen AS terhadap proses reformasi TNI. Bantuan militer AS kepada Indonesia disalurkan melalui program Foreign Military Financing (FMF) dan International Military Education and Training (IMET), khususnya dalam rangka peningkatan kemampuan transportasi TNI dalam penanganan bencana alam serta program peningkatan profesional prajurit.

Sejak tahun 2002 terdapat forum pertemuan tahunan militer RI – AS ’Indonesia–United States Security Dialog (IUSSD) serta forum tahunan US–Indonesia Bilateral Defense Dialogue (USIBDD) yang dilaksanakan berselingan dengan IUSSD. Pertemuan USIBDD ke-11 berlangsung di Hawaii, AS tanggal 7-11 Februari 2011 sedangkan forum IUSSD ke-8 berlangsung tanggal 25-26 Mei 2010.

Kerjasama keamanan RI – AS dikukuhkan melalui penandatanganan LoI between INP and FBI on Mutual Cooperation in Capacity Building and Combating Transnational Crimes pada bulan Maret 2011 yang melandasi kerjasama Badan Penyelidik Federal (FBI) AS dengan Polri (Densus 88) dalam pemberantasan terorisme. Sebelumnya, pada tanggal 8 November 2010 telah ditandatangani MoU between the Government of the UnitedStates of America and the Republic of Indonesia on Capacity Building to Strengthen the Security of Biological Pathogens yang menjadi landasan kerjasama pelatihan capacity building di bidang biosecurity dan biosafety guna memperkuat keselamatan laboratorium dan keamanan patogen dari akses illegal.

1. http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com\_content&view=article&id=13613:dilema-keamanan-dan-perimbangan-kekuatan-di-asia-tenggara-&catid=11:opini&Itemid=83 [↑](#footnote-ref-1)
2. ibid [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8295/1685/>. [↑](#footnote-ref-4)
5. http://blogmiliterindonesia.blogspot.com/2014/02/daftar-alutsista-indonesia-terbaru-2014.html [↑](#footnote-ref-5)
6. http://cintabelanegara.blogspot.com/2014/01/jangan-remehkan-kekuatan-militer-ri-di.html [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid [↑](#footnote-ref-7)
8. http://husnulmurtadlo-fisip11.web.unair.ac.id/artikel\_detail-66889-Umum-Respon%20Amerika%20Terhadap%20%20Kekuatan%20Baru%20China.html [↑](#footnote-ref-8)
9. http://bobbyreyner.blogspot.com/2012/01/h-ubungan-ri-amerika-serikat-as-telah.html [↑](#footnote-ref-9)
10. http://atdikbud-usa.org/2013/10/hubungan-amerika-serikat-dengan-indonesia-sebulum-dan-sesudah-embargo-senjata-dikaji-dalam-didang-militer/ [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat, United States National Security Strategy, May 2010, hal.17 [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/09/fact-sheets-united-states-and-indonesia-building-a-21st-century-partners> [↑](#footnote-ref-12)
13. http://bobbyreyner.blogspot.com/2012/01/h-ubungan-ri-amerika-serikat-as-telah.html [↑](#footnote-ref-13)